

Problematika Kehidupan Muslim Minoritas di Asia Tenggara (Muslim Melayu Pattani, Muslim Moro, dan Muslim Rohingya)

¹Rafika Dewi Septia, ²Yenni Pusvita Dewi, ³Rizki Febriansyah, ⁴Ismail, ⁵Mindani

¹²³⁴⁵UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Mail:

1rdewisepitia@gmail.com

2pusvitayenni78@gmail.com

3rizkicool4567@gmail.com

4ismail@mail.uinfabengkulu.ac.id

5mindani@mail.uinfabengkulu.ac.id

Abstract: Unlike the case with non-Muslim minorities who can live comfortably in a country with a Muslim population as the majority, the three Muslim entities mentioned above live in many conflicts with the government in the country they live in. The purpose of this study is to explore the problems and problems of Muslim life as a minority in several regions in Southeast Asia, namely Thailand, the Philippines and Myanmar. The result of this study is that from the three ethnic Muslim minorities, the case is almost the same, namely experiencing rejection, torture murder and discrimination from the Government where they live, but so far discrimination against Rohingya Muslims is the worst discrimination, this is in line with what Human Rights says, Rohingya Muslims are the most oppressed Muslim Minority ethnicity.

Keywords: Problematic; Muslim minority; Pattani Muslim; Moro Muslim; Rohingya Muslim;

1. PENDAHULUAN

Asia Tenggara merupakan wilayah di benua Asia bagian tenggara yang mencakup berbagai wilayah yang terbagi ke dalam dua bagian yaitu Asia Tenggara daratan yang mencakup negara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan vietnam kemudian Asia Tenggara Maritim yang mencakup negara Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Timor Leste. Asia tenggara merupakan wiayah dengan keberagaman budaya dan kepercayaan yang majemuk, salah satu kepercayaan yang banyak di anut di asia tenggara adalah Hindu-Budha dan Islam.

Islam masuk ke Asia tenggara pada abad ke-7 masehi melalui pedagang Arab. Malaka adalah pintu masuk utama datangnya Islam di Asia Tenggara melalui masyarakat melayu yang kemudian menyebar luas hingga ke samudera pasai. Hingga saat ini pemeluk Islam di asia Tenggara mencapai 240 juta jiwa, dengan penduduk muslim terbesar di dunia di pegang oleh negara yang ada di Asia Teggara yakni Indonesia yaitu sekitar 12,9 persen dari keseluruhan umat muslim yang ada di dunia.

Meskipun negara dengan pemeluk Islam terbanyak berasal dari Asia Tenggara, namun di beberapa negara di Asia Tenggara, Islam merupakan agama minoritas, misalnya saja Muslim Pattani di Thailand bagian selatan, Muslim Moro di Filipina dan etnis Muslim Rohingya di Myanmar. Berbeda halnya dengan non-Muslim minoritas yang dapat hidup aman dengan nyaman di negara dengan penduduk Muslim sebagai mayoritas, ketiga entitas Muslim yang telah disebutkan di atas hidup dengan banyak konflik dengan pemerintahan di negara yang mereka tinggali.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengupas problematika dan problematika kehidupan Muslim sebagai minoritas di beberapa wilayah di Asia Tenggara yakni Thailand, Filipina dan Myanmar, maka dari itu dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut: 1) bagaimana problematika kehidupan Muslim Pattani di Thailand Selatan?, 2) bagaimana problematika kehidupan Muslim Moro di Filipina bagian Selatan?, 3) bagaimana problematika kehidupan etnis Muslim Rohingya di Myanmar?

Tinjauan Pustaka

Muslim Pattani di Thailand bagian selatan merupakan salah satu contoh etnis Muslim Melayu yang hidup berkonflik dengan pemerintahan. Pemerintah Thailand berusaha merubah kurikulum pendidikan agama seperti pondok pesantren yang di Thailand bagian selatan dengan cara memasukkan pelajaran-pelajaran yang tidak ada kaitannya dengan Agama Islam, serta mengintimidasi guru-guru disana dengan tuduhan teroris, serta mengirimkan militer ke pelosok daerah dengan dalih untuk menjaga keseimbangan politik.

Bangsa Moro yang merupakan penduduk Muslim yang berada di Filipina bagian selatan juga memiliki nasib sama dengan Muslim Pattani di Thailand Selatan. Bangsa Moro hidup dengan dibawah pemerintahan Marcos yang berkuasa sejak 1965 yang memperlakukan Muslim dengan diskriminatif, diantaranya yaitu dengan peniadaan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi Muslim Moro di Filipina bagian selatan. Begitupun dengan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar, berbagai deskripsiasi dari pemerintah juga dirasakan oleh etnis Muslim Rohingya di Myanmar.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian jurnal artikel ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, koran, artikel dan tulisan-tulisan yang memuat data-data yang diperlukan dalam penulisan artikel ini, data-data tersebut yaitu tentang Muslim minoritas yang ada di Thailand, Filipina dan Myanmar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Kehidupan Muslim Pattani Di Thailand Selatan

Thailand selatan terdiri dari tiga provinsi yakni Pattani, Narathiwat dan Yala yang merupakan wilayah dengan sejarah identitas yang berbeda dari Negara Thailand itu sendiri. Tiga wilayah sepadan selatan merupakan sebutan lain untuk provinsi Pattani, Narathiwat dan Yala yang memiliki kedudukan sebagai daerah kekuasaan politik yang memiliki sejarah keaulatan tersendiri. Muslim Pattani sendiri memiliki identitas yang berbeda dengan Muslim Thailand lainnya, bagi Muslim Pattani, kesempurnaan mereka

dicapai tidak hanya dengan menjadi muslim saja tetapi juga harus menjadi melayu, oleh sebab itu komunitas muslim Pattani juga disebut sebagai Muslim Melayu Pattani, melekatnya etnis melayu pada muslim Pattani disebabkan karena terjadinya asimilasi antara Agama Islam yang dianut dengan kebudayaan melayu.

Sebelum wilayah Pattani berada di bawah pemerintahan Thailand, wilayah tersebut bernama Negeri Pattani Darussalam yang berbentuk kerajaan dan diperintah oleh Kesultanan Islam Melayu. Wilayah ini merupakan wilayah yang sangat makmur dengan pusat pelabuhan terkenal di sekitar Laut China Selatan, dan hal inilah yang menyebabkan wilayah Patatani Darussalam menjadi incaran dari bangsa siam atau bangsa Thailand yang merupakan musuh bangsa Melayu dan seringkali menyebabkan ancaman-ancaman terhadap bangsa melayu. Hal ini menyebabkan wilayah muslim melayu Pattani tidak pernah aman dari konflik dengan pemerintahan Thailand.

Mayoritas penduduk Thailand adalah penganut agama Budha dan muslim menjadi agama minoritas di Thailand, yang mayoritas pemeluk agama Islam berada di Thailand selatan. Pada dasarnya muslim melayu Pattani tidak memiliki sifat radikal, mereka memiliki nilai-nilai toleransi yang tinggi terhadap tradisi-tradisi lain dengan tetap mempertahankan kebudayaan yang melekat pada muslim Pattani dari pengaruh budaya luar, akan tetapi sifat tersebut dapat berubah menjadi sifat militan apabila ada yang mencoba mengancam keberlangsungan budaya muslim melayu Pattani salah satunya yaitu budaya siam yang berintegrasi penuh kedalam agama Budha dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Thailand.

Perlawanan muslim melayu Pattani dimulai sejak jatuhnya pattani kedalam kekuasaan bangsa siam yang memaksa memasukkan budaya siam kedalam budaya pattani, yang mana kedua budaya ini menurut bangsa melayu pattani sangat bertolak belakang, sebab budaya melayu Pattani berintegrasi kedalam Agama Islam, sedangkan budaya Siam begintegrasi kedalam Agama Budha. Hal ini menyebabkan bangsa Muslim Melayu Pattani beranggapan bahwa pemerintahan sedang berusaha menghilangkan budaya Muslim Melayu Pattani, demi mempertahankan budaya Muslim Melayu Pattani maka terjadilah perlawanan dari bangsa Pattani.

Selain karena bangsa siam yang telah berubah menjadi Negara Thailand pada awal abad ke 20 yang memaksa memasukkan budaya mereka kedalam budaya Pattani, mereka juga memaksa bangsa Melayu Pattani merubah bahasa dari bahasa melayu menjadi bahasa Thailand, dan memaksa merubah kurikulum pendidikan di pondok pesantren dengan memasukkan mata pelajaran di luar agama Islam, serta mengintimidasi guru-guru yang ada di pondok dengan tuduhan teroris, lalu penyebab lain dari pemberontakan Muslim Melayu Pattani adalah ketidak adilah pemerintah Thailand terhadap Muslim Melayu Pattani dengan penduduk mayoritas Thailand yaitu dari segi infrastruktur, layanan publik, kesenjangan ekonomi, serta dalam politik pemerintah Thailand tidak banyak mengikut sertakan dari kalangan Muslim Melayu Pattani yang hal ini dianggap sebagai tindakan deskriminatif dari pemerintah Thailand terhadap Muslim Melayu Pattani.

Konflik ini semakin membara setelah pemerintah Thailand mengesahkan dan mulai memberlakukan Undang-Undang darurat yang memberi kebebasan terlampau kepada militer sehingga anggota militer menjadi angkuh dan tidak segan melepaskan peluru

kepada masyarakat Muslim Melayu Pattani yang mengakibatkan jumlah korban meningkat dratis. Berbagai upaya perdamaian telah ditawarkan oleh pemerintah Thailand namun belum ada kebijakan dengan hasil yang signifikan. Salah satu upaya perdamaian yang dilakukan adalah upaya rekonsiliasi yang tidak berhasil dilakukan disebabkan oleh sikap yang menunjukkan pro kebijakan pemerintah pusat terhadap pemaksaan penggunaan bahasa Thailand dan budaya siam-Budha masuk kedalam pendidikan Islam Pattani sehingga masyarakat Muslim melayu Pattani tidak merasakan dampak apapun dari resolusi tersebut.

Dalam kasus Muslim Pattani, berbagai solusi seperti otonomi atau kemerdekaan masih terus dijadikan pembahasan dan bukanlah perkara yang mudah, sebab masalah ini berakar dari pemaksaan mencampurkan perbedaan budaya, etnis dan kepercayaan. Namun akhir-akhir ini, solusi perdamaian tersebut mengarah kepada alternatif otonom. Meskipun pada kenyataannya otonom yang dijalankan tetaplah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Muslim Melayu Pattani karena pemerintah dan penguasa Thailand tetap tidak ingin melepaskan peran dan kontrolnya terhadap wilayah Pattani.

Problematika Kehidupan Muslim Moro Di Filipina Selatan

Pada awalnya Islam merupakan agama mayoritas di Filipina sebelum Spanyol melakukan kolonialisme. Filipina adalah salah satu negara yang ada di Asia Tenggara. Dahulu Filipina merupakan negara jajahan Spanyol, dan kini Filipina adalah rumah bagi sebagian umat muslim tepatnya di Filipina bagian selatan.

Islam masuk ke Filipina melalui para pedagang dari Indonesia tepatnya Sumatera dan juga pedagang dari Malaysia pada abad ke-13. Setelah itu mulailah berdiri berbagai kesultanan Islam yang memiliki kekuasaan, kesultanan-kesultanan tersebut antara lain adalah Sulu dan Mindano.

Namun Caesar Adib dalam bukunya yang berjudul Dinamika Islam Filipina menjelaskan bahwa Islam diperkirakan sudah dikenalkan di Filipina Selatan mulai pada abad ke 10 yang dilakukan oleh para pedagang Arab sebelum mereka menuju ke Cina, dan disebutkan pula bahwa pada abad ke 10-15 Islam merupakan agama mayoritas di Filipina.

Konflik muslim di Filipina Selatan adalah konflik yang sudah terjadi sejak abad ke 15 yaitu ketika bangsa spanyol datang dan menjadikan negara Filipina sebagai negara jajahan mereka. Spanyol datang dengan membawa misi kristenisasi terhadap masyarakat Filipina yang pada saat itu sebagian besar merupakan penganut agama Islam. Filipina juga menerapkan sistem politik yaitu memecah belah dan menghancurkan. Pada saat itu Spanyol berhasil mengkristenkan sebagian besar masyarakat Filipina, kecuali Sulu dan Mindano yang saat itu merupakan wilayah yang sangat sulit untuk dikuasai Spanyol karena perlawanan yang sangat tegas.

Karena Spanyol tidak mampu menguasai dan melakukan kristenisasi kepada masyarakat Mindano, maka Spanyol melakukan cara licik agar masyarakat Mindano dibenci oleh masyarakat Filipina, yaitu dengan memfitnah mereka dengan sebutan moro (moro) yang memiliki arti tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, jahat, tidak memiliki tuhan dan orang-orang yang suka membunuh, dan sejak saat itulah penduduk Filipina

selatan disebut sebagai bangsa moro. Julukan itulah yang membuat masyarakat muslim moro dianggap sebagai kelompok sparatis yang membahayakan.

Kemudian pada tahun 1898 Spanyol menjual wilayah jajahannya yakni Filipina kepada Amerika seharga 20 juta \$ Mexico. Penjualan tersebut dilatarbelakangi dengan campur tangan Amerika terhadap politik di daerah jajahan Spanyol yaitu Filipina, Spanyol marah dan terjadilah perang antara Spanyol dan Amerika, yang pada akhirnya Amerika memenangkan peperangan ini. Setelah itu maka Filipina termasuk Filipina selatan jatuh di bawah jajahan Amerika.

Amerika menunjukkan sikap yang berbeda dengan Spanyol, Amerika menunjukkan sikap yang baik serta memberikan kebebasan kepada masyarakat Moro untuk melakukan aktivitas dan memeluk agama Islam, Sulu dan Mindano kemudian dijadikan sebagai satu kawasan oleh Amerika yang kemudian diberi nama Moroland dengan alasan melestarikan masyarakat Mindano dan Sulu, namun Amerika membuat peraturan bahwa masyarakat Filipina Utara diwajibkan untuk pindah ke Filipina selatan dengan janji sebuah kemakmuran, Amerika juga memberikan kebebasan kepada masyarakat Filipina Selatan Untuk menguasai tanah-tanah di Filipina Selatan yang mengakibatkan Muslim Moro menjadi minoritas di daerahnya sendiri.

Amerika memberikan kemerdekaan kepada Filipina pada tahun 1946. Masyarakat muslim moro tidak pernah merasakan arti apapun dari kemerdekaan itu, terlebih lagi ketika Filipina berada dibawah pimpinan Ferdinand Marcos pada tahun 1965, Marcos berlaku diskriminatif terhadap masyarakat muslim moro, perlakuan tersebut diantaranya adalah, pencabutan jaminan kesehatan dan pendidikan serta melarang masyarakat moro untuk bergabung dalam pemerintahan dan dilarang menyalurkan aspirasi mereka. Perlakuan diskriminatif tersebut menyebabkan ketimpangan sosial dan politik yang sangat terlihat jelas. Selain itu pelanggaran-pelanggaran HAM terus dilakukan oleh Marcos terhadap masyarakat Muslim Moro.

Kekejaman Marcos terhadap masyarakat muslim Moro tidak berhenti sampai disitu, Marcos juga membentuk kelompok untuk menyoroti masyarakat moro, mengambil lahan-lahan umat muslim, membuat rusuh umat muslim di Filipina selatan, tujuan utama dari Marcos sendiri yaitu penghapusan umat Muslim dari Filipina, hal ini dilakukan dengan cara pengusiran, pembunuhan, penghancuran, bahkan yang lebih kejam yaitu pembantaian yang dilakukan di pulau Coregidor yang dikenal dengan Tragedi Jabidah, hal itu dilakukan dengan cara dalih akan melatih para pemuda muslim, namun setelah dilatih, mereka membantai seluruh pemuda muslim tersebut.

Kekejaman-kekejaman tersebutlah yang kemudian mendorong masyarakat Muslim Moro melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Filipina diawali dengan pembentukan (Muslim Movement Independent) yang didirikan oleh Datuk Udtog Matalam, MNLF (Moro National Liberation Front) yang dipelopori oleh Nur Misuari, kemudian kelompok Abu Sayyaf yang dianggap sebagai kelompok separatis liberal, tujuan kelompok-kelompok tersebut adalah sama, yakni pembebasan masyarakat Muslim Moro dari pemerintah Filipina.

Konflik antara masyarakat muslim Moro dengan pemerintah Filipina, termasuk juga pembantaian yang dilakukan pemerintah Filipina telah menjadi perhatian besar pada saat

itu, bahkan hal tersebut dijadikan agenda pembahasan tahunan oleh negara-negara yang tergabung dalam perserikatan negara Islam atau (OKI). Dalam upaya meredakan konflik antara Masyarakat Muslim Moro dengan pemerintah Filipina, OKI dan Libya merupakan mediator yang memiliki peranan besar dalam hal ini. OKI mendesak Marcos untuk segera menyelesaikan konflik dengan Muslim Moro, sampai akhirnya disetujui otonomi tiga belas provinsi di Selatan dimana persentase Muslim yang terbesar.

Berbagai upaya untuk meredakan konflik antara masyarakat Muslim Moro dengan pemerintah Filipina telah diupayakan, salah satunya yaitu dengan perjanjian perdamaian yang dinamai dengan Tripoli Agreement, yang ditandatangani oleh Tripoli, Libya dan Pemimpin MNLF serta menteri pertahanan. Selain itu, terdapat pula upaya-upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah Filipina seperti adanya perjanjian Jeddah Accord, Peace Agreement 1996, Pembentukan Kementerian Urusan Agama Islam, Pembentukan Badan Pengelola Perjalanan Haji Filipina, Mendirikan Institut Studi-studi Islam Universitas Manila, Mendirikan King Faisal Centre for Islamic and Arabic Studies, Mindanao State University, Pusat Studi Perdamaian Filipina Selatan (Southern Philippines Center for Peace Studies), dan Melancarkan Philippines Amanah Bank dan Dana Pembangunan Muslim.

Problematika Kehidupan Muslim Minoritas Etnis Rohingya Di Myanmar

Myanmar merupakan salah satu negara yang ada di Asia Tenggara yang dikelilingi oleh banyak negara, diantaranya adalah Tiongkok, India, Laos, Thailand dan Bangladesh. Terdapat banyak etnis minoritas di Myanmar yakni sebanyak 135 etnis, dengan etnis mayoritas yaitu etnis Burma. Myanmar mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, sebelum menjadi Myanmar, nama negara ini dahulunya adalah Burma, tujuan penggantian nama Burma menjadi Myanmar yakni sebagai simbol bahwa Myanmar telah lepas dari jajahan Inggris, selain itu menurut Menlu U Ohn Gway penggantian nama tersebut juga bertujuan untuk menyatukan seluruh etnis yang ada di Myanmar, sebab Burma pada dasarnya adalah nama dari salah satu etnis di Myanmar, maka penggantian dari Burma menjadi Myanmar agar etnis selain Burma juga merasa menjadi bagian dari negara ini.

Dengan tujuan penggantian nama tersebut seharusnya seluruh etnis yang ada di Myanmar menantikan perlakuan yang sama dari pemerintah Myanmar, namun tidak dengan salah satu etnis minoritas yang ada di Myanmar yakni etnis Muslim Rohingya, etnis ini ditetapkan PB sebagai etnis yang paling teraniaya. Berbagai diskriminasi dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya. Perbedaan fisik, bahasa, budaya, agama, dijadikan landasan yang membenarkan pernyataan pemerintah Myanmar bahwa etnis Muslim Rohingya yang telah ratusan tahun tinggal di Myanmar sebagai etnis pendatang ilegal.

Berbagai pelanggaran HAM dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya, mulai dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran yang berat. Pemerintah Myanmar dengan tegas tidak mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari Myanmar, pemerintah menolak memberikan kewarganegaraan kepada etnis Muslim Rohingya, bahwa hingga saat ini, etnis Muslim Rohingya merupakan etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan. Etnis Muslim Rohingya di Myanmar tidak memiliki akses atas

tanah, pendidikan serta pekerjaan yang layak. Bahkan pemerintah membatasi etnis rohingya dalam memiliki keturunan, yakni hanya 2 anak per keluarga, serta anak tersebut tidak diberikat sertifikat kelahiran. Selain itu pemerintah juga berupaya mempengaruhi etnis muslim Rohingya untuk pindah memeluk agama Budha yaitu agama mayoritas di Myanmar.

Berdasarkan laporan dari Amnesti Internasional, selain kekejaman yang telah disebutkan diatas, berbagai kekejaman lain yang dilakukan Junta Militer terhadap etnis Muslim Rohingya diantaranya yaitu pembunuhan, penahanan, penyiksaan, pelecehab terhadap wanita dan kerusuhan anti muslim rohingya.

Konflik memuncak pada tahun 2012 ketika media internasional mulai membuka fakta-fakta adanya kekerasan terhadap etnis muslim Rohingya di Myanmar, hal ini memancing etnis Rakhine melakukan kekejaman lain terhadap etnis Muslim Rohingya, hal itu diduga karena kecemburuan etnis Rakhine terhadap etnis Muslim Rohingya, sebab meski sama-sama etnis minoritas, namun etnis rohingya mengalami peningkatan yang signifikan. Meningkatnya konflik dimulai ketika kelomo etnis Rakhine membakar pemukiman yang ditinggali oleh etnis muslim Rohingya. Kejahatan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya membuat mereka memutuskan untuk keluar dari negara Myanmar.

Polisi dan tentara Myanmar melakukan Operasi Naga Nim (ONM) yakni operasi pengusiran dengan kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya di Arakan, hal ini mengakibatkan lebih dari 1.700 orang dibunuh karena tidak bisa menunjukkan kartu identitas, yang sebenarnya mereka memang tidak akan bisa menunjukkan kartu identitas tersebut karena pemerintah Myanmar tidak memberikannya. Sekitar 200.000 orang mengungsi ke Bangladesh yang kemudian di tempat ini, lebih dari 10.000 orang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Peristiwa ini disebut oleh human rights sebagai pembunuhan dan pemberantasan etnis.

Siegfried O. Wolf, menjelaskan bahwa pemerintah Myanmar merupakan dalang dari segala penderitaan Rohingya di Myanmar. Pemerintah menganggap etnis Muslim Rohingya sebagai saingan dalam kehidupan sosial politik di Myanmar, sebab etnis Rohingya dianggap sebagai oposisi dari Pemerintahan Myanmar. Junta militer Myanmar dianggap secara sengaja memelihara kebencian massa terhadap Rohingya untuk mengalihkan sorotan publik kepada mereka. Masyarakat myanmar memang mendesak pemerintah dalam keterbukaan terkait politik Myanmar dengan kata lain Masyarakat mendesak sebuah demokrasi dari pemerintahan yang saat itu otoriter dan tertutup serta banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar. Maka dari itu Junta Militer Myanmar menyebarkan berita bahwa Rohingya adalah calon penguasa-penguasa baru yang akan menjajah sumber penghasilan masyarakat Myanmar, hal ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh etnis membenci Rohingya sehingga fokus mereka terhadap pemerintahan menjadi hilang.

Selain mengungsi Bangladesh, etnis Muslim Rohingya juga mengungsi ke Malaysia yang merupakan negara Islam, namun tetap saja mereka adalah etnis tanpa Identitas dan kewarganegaraan yang jelas, kemudia mengungsi ke Thailand menggunakan boat yang kemudian oleh pemerintah Thailand dikembalikan lagi ke laut atau tidak diterima di

Thailand, selain ke Bangladesh, Malaysia dan Thailand, etnis Muslim Rohingya juga berlayar menggunakan boat untuk mengungsi ke Australia namun pemerintah Australia tidak membiarkan boat milik Rohingya masuk dan mendarat di Australia.

Berbagai upaya penyelesaian konflik telah dilakukan termasuk oleh ASEAN dan OKI (organisasi Kerjasama Islam) yaitu dengan menekan pemerintahan Myanmar untuk segera mengakhiri konflik antara pemerintahan dengan etnis Muslim Rohingya. Pemerintah Burma-Myanmar menawarkan solusi kewarganegaraan dengan syarat yang mendapat adalah keluarga yang minimal telah dua generasi lahir dan tinggal di Burma-Myanmar dan dikelompokkan kedalam etnis Bengali. Dikarenakan merasa bukanlah Bengali, warga Muslim Rohingya ini lebih memilih untuk tetap mempertahankan identitasnya. Kebijakan. Sehingga, hingga saat jurnal ini ditulis, masih belum ada penyelesaian bagi kasus etnis Muslim Rohingya yang tidak memiliki identitas kewarganegaraan yang sah meskipun saat ini etnis Rohingya telah tinggal di camp penampungan di Bangladesh, sebagian tersebar di Malaysia, sebagian kecil di Saudi Arabia, bahkan ada yang masih tinggal di perairan dengan kapal sehingga mereka dikenal dengan manusia boat. Akhir 2023 hingga saat ini awal 2024, etnis Rohingya kembali mendarat di Indonesia yang saat ini masih menjadi perdebatan terkait nasib etnis muslim Rohingya kedepannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa:

Muslim Melau Pattani merupakan kelompok muslim di Thailand selatan yang menjaga budaya dan ajaran Muslim Melau dengan sangat ketat, mereka tidak mengizinkan budaya apapun mempengaruhi kebudayaan dan ajaran mereka, namun pemerintah Thailand memaksa untuk memasukkan budaya dan ajaran Budha ke dalam budaya dan ajaran muslim Pattani, selain itu perlakuan diskriminatif dan ketidak adilan menyebabkan munculnya gerakan pemberontakan oleh Muslim Melau Pattani yang meminta hak otonom kepada pemerintah Thailand, konflik masyarakat Muslim Melau Pattani dengan pemerintah Thailand diredam dengan cara memberikan hak otonom, namun tetap saja hak otonom tersebut bukanlah yang diinginkan oleh muslim Pattani, sebab pemerintah masih saja ikut campur dalam urusan wilayah tersebut.

Pada masyarakat muslim Moro di Filipina selatan, konflik diawali ketika Amerika menatukan masyarakat dari Filipina Utara dengan masyarakat Muslim Moro yang membuat muslim moro menjadi minoritas di daerahnya sendiri, kemudian diskriminasi, pembantaian, dan ketidak adilan yang dilakukan Marcos memicu gerakan pemberontakan dari masyarakat Muslim Moro, yang menyebabkan negara-negara OKI turun langsung menengasi konflik tersebut, yang kemudian terciptalah berbagai upaya perdamaian salahsatunya yaitu perjanjian Tripoli.

Pada masyarakat etnis Muslim Rohingya, konflik diawali ketika mereka tidak diakui sebagai etnis dari Myanmar dikarenakan bentuk fisik, bahasa, budaya dan agama yang berbeda dari suku Myanmar kebanyakan, hingga perlakuan diskriminatif, pembunuhan secara massal, pengusiran dan tidak diberikannya hak kewarganegaraan menjadi pemicu konflik tersebut, pemerintah Myanmar bersedia memberikan kewarganegaraan dan memberikan hak-hak etnis muslim Rohingya dengan syarat mereka masuk sebagai etnis

Bengaal, namun masih banyak yang menolak karena mereka ingin mempertahankan identitas dan etnis asli rohingya, kasus Rohingya ini hingga sekarang masih belum ada kejelasan, bahkan hingga saat ini masih banyak masyarakat Rohingya yang masih menjadi manusia boat yang hidup terlunta-lunta di laut lepas.

Dari ketida etnis muslim minoritas tersebut kasusnya hampir sama, yakni mengalami penolakan dan deskriminasi dari Pemerintah dimana mereka tinggal, namun sejauh ini deskriminasi terhadap Muslim Rohingya adalah deskriminasi yang paling buruk, hal ini sesuai dengan yang dikatakan Human Right, yakni muslim Rohingya adalah etnis Muslim Minoritas yang paling tertindas.

Karena keterbatasan waktu dan sumber penelitian, maka kami berharap penelitian-penelitian yang akan datang dapat menulis artikel jurnal tentang problematika-probatika yang dialami muslim sebagai minoritas dengan lebih mendalam lagi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sodiqin. 2016. 'HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DI MASYARAKAT MUSLIM PATTANI THAILAND (Integrasi, Konflik Dan Problematikanya)', *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, <<https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.524>>.
- Eva Putriya Hasanah. 2017. 'Studi Eksplanatif Penyebab Gerakan Separatis Minoritas Muslim Moro Di Filipina', *Journal of Integrative International Relations*, <<https://doi.org/10.5281/zenodo.4885021>>.
- F S Pratama. 2022. 'NUR MISUARI PEJUANG MUSLIM FILIPHINA Pasang Surut Karir Politik Dan Perjuangan Muslim Moro (1939-2018)', *Hadharah: Jurnal Keislaman Dan Peradaban*, <<http://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/hadharah/article/view/3359>>.
- Firmanzah Firmanzah. 2017. 'Dinamika Gerakan Pembebasan Muslim Moro Di Filipina Selatan: Studi Terhadap Moro National Liberation Front (1971-1996)', *Intelektualita*, <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1299>>.
- Gulia Ichikaya Mitzy. 2017. 'Perlawanan Etnis Muslim Rohingya Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar', *Global South Review*, <<https://doi.org/10.22146/globalsouth.28836>>.
- Helmiati. 2016. 'Pergulatan Minoritas Muslim Thailand Menelisik Peran Akademisi , Tokoh Agama & LSM Dalam Upaya Mencari Solusi Konflik Berkepanjangan', <https://dalamislam.com/sejarah-islam/sejarah-masuknya-islam-ke-asia-tenggara>
- Irham Nuerang. 2016. 'Problematika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan Dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam', *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*.
- Kusman. Agus.2009. 'Islam Asia Tenggara', UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- M Angela Merici Siba and Anggi Nurul Qomari'ah. 2018. 'Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya', *Jurnal Islamic Word and Politics*, 5 <<https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/5826>>.
- Mohd. Zambari A. Malek. 1993. *Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik*. Shah Alam: Hizbi.
- Nasruddin.2017. *Islam di Myanmar, Dalam Jurnal al-Hikmah*.

- Nuril Ayni. 2021. 'Kasus Konflik Internal Moro Hingga Kancan Internasional (1946-2019)', BAKABA : Jurnal Sejarah Kebudayaan Dan Pendidikan.
- Riswanto, Rodwan Melay, and Tugiman. tt. 'Konflik Muslim Moro Dengan Pemerintah Filipina Tahun 1968 – 1996 (Suatu Kajian Historis)', FKIP-Universitas Riau.
- Wa Ode Rizka Fauzia Ali. 2022. 'Sejarah Konflik Muslim Rohingya', Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera<<https://doi.org/10.59059/jpmis.v1i3.6>>.